



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2025

**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut ditempuh melalui implementasi strategis, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis 5 (Lima) tahun Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara memuat tujuan dan sasaran untuk pembangunan Tupoksi. Adapun tujuan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Dinas Pertanian dan Peternakan dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusif.
2. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat tani dan ternak.
3. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya lahan, air dan teknologi dalam upaya optimalisasi produksi dan pelestarian agroekologi.
4. Meningkatkan Kinerja tenaga penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan petani.
5. Meningkatkan hasil produk peternakan beserta ikutannya.
6. Meningkatkan usaha budidaya ternak sesuai potensi lokal/wilayah.
7. Meningkatkan derajat kesehatan ternak masyarakat.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan publik Dinas Pertanian dan Peternakan.
2. Meningkatnya kesejahteraan keluarga tani melalui ketahanan pangan dan pemasaran hasil Pertanian dan Peternakan.
3. Meningkatnya masyarakat tani dan ternak yang menggunakan paket teknologi dan terjadi peningkatan produksi Pertanian dan Peternakan.
4. Meningkatnya produksi jagung melalui pengelolaan sumberdaya lahan dan air serta teknologi.
5. Meningkatnya pengelolaan pelestarian agroekologi melalui pengembangan komoditas spesifik lokal.
6. Ketersediaan Pangan asal ternak.
7. Penurunan Kasus penyakit Ternak dan hewan lainnya.
8. Optimalisasi penerapan teknologi tepat guna.

Dari Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan tersebut hingga sejauh ini Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan berbagai upaya terobosan dalam hal realisasi pelaksanaan fisik Kegiatan sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp 215.087.694.836.00 atau sebesar 88,08 %. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pertanian antara lain :

1. Kurangnya dukungan Staf terhadap Komitmen Pimpinan
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki
3. Keterbatasan Benih Bermutu
4. Pengembalian fungsi kesuburan tanah yang masih rendah
5. Penggunaan pupuk dan pestisida belum optimal
6. Ketersediaan alat mesin pertanian belum cukup
7. Penanganan pengendalian serangan OPT masih minim
8. Pengolahan dan pemasaran hasil belum optimal
9. Intensitas pembinaan dan monitoring kegiatan lapangan belum optimal
10. Pemetaan wilayah komoditas prioritas belum jelas
11. Belum tersedia data dan informasi secara online
12. Masih Rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Kartanegara.
13. Sistem irigasi pertanian dan infrastruktur jalan usaha tani belum mampu mendukung untuk berkembangnya produksi dan pemasaran hasil pertanian dan Peternakan secara memadai.
14. Kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian dan Peternakan khususnya lahan sawah ke sektor penggunaan lain.
15. Jalanan kerjasama kemitraan dan keterkaitan usaha di dalam internal sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura maupun eksternal (dengan sub sektor/sektor lainnya) masih lemah serta pemasaran produk masih terbatas di tingkat lokal.
16. Semakin meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi menuju terwujud-nya pelayanan bidang pertanian dan Peternakan yang mampu memuaskan masyarakat.
17. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima.
18. Perubahan Peraturan Pemerintah baik itu Peraturan Presiden ataupun Peraturan Menteri.
19. Faktor-faktor pengalaman usaha, modal usaha, jumlah ternak, jumlah tenaga kerja, pendidikan pengelola, ransum makanan dan pemberian obat-obatan baik secara bersama-sama maupun sendiri mempengaruhi keberhasilan peternakan.

Berdasarkan beberapa kendala dapat dirumuskan isu strategis Dinas

Pertanian dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sistem pengairan berupa ketersediaan waduk, bendungan dan jaringan irigasi yang jumlahnya masih terbatas.
2. Infrastruktur pendukung terutama jalan usaha tani dan akses jalan pedesaan ke lokasi pemasaran yang belum optimal.
3. Sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian) yang masih kurang ketersediaanya di tingkat kelompok tani.
4. Luas tanam dan luas panen yang belum optimal.
5. Produktivitas padi sawah yang belum maksimal (masih bisa ditingkatkan lagi)
6. Sumber daya manusia petani, penyuluh dan petugas terbatas kualitas dan kuantitasnya.
7. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima.
8. Kurangnya pengalaman usaha, modal usaha, jumlah ternak, jumlah tenaga kerja, pendidikan pengelola, ransum makanan dan pemberian obat-obatan baik secara bersama-sama maupun sendiri mempengaruhi keberhasilan peternakan.

Bertolak dari Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai diatas, maka Strategi yang dilakukan Dinas Pertanian dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mendayagunakan aparatur yang berkompeten, PPL dan/atau tenaga ahli dalam mengawal dan memfasilitasi pengembangan budidaya tanaman dan peternakan.
2. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga litbang pertanian dan peternakan dalam rangka pemanfaatan, penerapan dan pengembangan teknologi budidaya dan pasca panen.
3. Melakukan kolaborasi dan sinergitas sumber daya dengan instansi terkait di tingkat kabupaten, tingkat propinsi dan tingkat pusat dalam rangka perluasan areal persawahan dan peternakan.
4. Mendorong dan memfasilitasi petani dan peternak untuk pengadaan sarana alsintan secara swadaya.
5. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal untuk memfasilitasi penciptaan kerjasama kemitraan di kalangan kelompo petani dan kelompok peternak/ kelompok usaha pengolahan.
6. Mendayagunakan sarana informasi dan promosi untuk memfasilitasi penciptaan kerjasama pemasaran hasil pertanian dan peternakan.
7. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian dan peternakan.
8. Mengikutsertakan PNS dalam berbagai pelatihan bidang perencanaan, administrasi, manajemen, keuangan dan teknis pertanian dan peternakan.
9. Mengembangkan agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rumusan Strategi diatas kemudian diwujudkan dalam suatu kebijakan sebagai berikut :

- 1) Kepastian ketersediaan lahan pangan berkelanjutan
- 2) Mengembangkan Pertanian berbasis Kawasan
- 3) Perbaikan sistem pertanian dari hulu sampai hilir
- 4) Dukungan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura
- 5) Mengembangkan peternakan pola integrasi
- 6) Peningkatan pengamatan, penyidikan dan pengendalian PHM Strategis
- 7) Penerapan Teknologi Peternakan
- 8) Meningkatkan kualitas sumber daya petani
- 9) Mempermudah akses permodalan.
- 10) Hilirisasi produk pertanian

Tenggarong, 26 Februari 2026



Pt. Kepala Dinas,

Moh. Rifani, S.Hut

Pembina IV/a

NIP.19720825 199703 1 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin senantiasa kami panjatkan, karena dengan ridho-Nya dan inayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. LKjIP ini merupakan implementasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Subtansi LKjIP ini merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, yang berisikan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang hasilnya akan dijadikan masukan dan umpan balik kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendorong penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).

Demikian, semoga laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan diikuti dengan peningkatan kinerja yang lebih baik oleh seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara serta bermanfaat dalam rangka meningkatkan keberdayaan petani dan mewujudkan kesejahteraan petani secara merata.

Tenggarong, 26 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas,



Moh. Rifani, S.Hut
Pembina IV/a

NIP.19720825 199703 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	2
1.3. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
1.4. Landasan Hukum	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah	7
2.2. Tujuan dan Sasaran	8
2.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	9
2.4. Realisasi Anggaran Tahun 2025	32
2.5. Strategi dan Arah Kebijakan	34
2.6. Rencana Kerja Tahun 2025	35
2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	48
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	57
3.1. Capaian Kinerja	57
3.2. Realisasi Anggaran	77
BAB IV. PENUTUP	81
4.1. Kesimpulan	81
4.2. Saran Dan Tindak Lanjut	82
LAMPIRAN	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Guna mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pertanian dan Peternakan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Bentuk upaya perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003. Penyusunan LKJIP Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

1.2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan dapat dijabarkan bahwa Distrik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pertanian dan Peternakan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan maka disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2021 Tanggal 27 September 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanian dan Peternakan, dimana Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Peternakan. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasar pada Pasal (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan
 - 1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan,
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional:
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional: dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional,
 2. Kelompok Jabatan Fungsional, dan

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Usaha dan Penyuluhan, membawahkan
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional,
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional,
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan

Kedudukan Pada Bagian Kesatu Pasal (2) Dinas Pertanian dan Peternakan, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pada Bagian Kedua Pasal (3) Dinas Pertanian dan Peternakan, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanian dan Peternakan.

Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga Pasal (4), Dinas Pertanian

dan Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Pertanian Dan Peternakan,
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pertanian Dan Peternakan
- c. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pertanian Dan Peternakan,
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Pertanian Dan Peternakan, Dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang di berikan Oleh Bupati.

Core Area

Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian. 2. Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian 3. Meningkatnya Produksi Peternakan 4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

1.3. Isu Strategis Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global, yang ditelaah melalui pendekatan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan SKPD, telaah Visi dan Misi Kutai Kartanegara IDAMAN Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih, telaah Renstra K/L dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Timur dan telaah RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Restrukturisasi Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota
2. Pengawasan
3. Kurangnya dukungan anggaran
4. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki
5. Keterbatasan Benih Bermutu
6. Penggunaan pupuk dan pestisida belum optimal
7. Ketersediaan alat mesin pertanian belum cukup
8. Penanganan pengendalian serangan OPT masih minim
9. Pengolahan dan pemasaran hasil belum optimal
10. Intensitas pembinaan dan monitoring kegiatan lapangan belum optimal
11. Pemetaan wilayah komoditas prioritas belum jelas

12. Belum tersedia data dan informasi secara online
13. Masih Rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Kartanegara.
14. Sistem irigasi pertanian dan infrastruktur jalan usaha tani belum mampu mendukung untuk berkembangnya produksi dan pemasaran hasil pertanian TPH secara memadai.
15. Kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian dan Peternakan khususnya lahan sawah ke sektor penggunaan lain.
16. Jalinan kerjasama kemitraan dan keterkaitan usaha di dalam internal sub sektor pertanian dan Peternakan maupun eksternal (dengan sub sektor/sektor lainnya) masih lemah serta pemasaran produk masih terbatas di tingkat lokal.
17. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima.
18. Faktor-faktor pengalaman usaha, modal usaha, jumlah ternak, jumlah tenaga kerja, pendidikan pengelola, ransum makanan dan pemberian obat-obatan baik secara bersama-sama maupun sendiri mempengaruhi keberhasilan peternakan.

1.4. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 17);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21); dan
10. Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN	(Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Isu Strategis Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan)
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	(Meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Program dan Anggaran Tahun 2025)
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	(Meliputi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran)
BAB IV	PENUTUP	(Meliputi Kesimpulan dan Saran Dan Tindak Lanjut)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan stakeholder.

Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dimana didalam Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- MISI 1.** Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
- MISI 2.** Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
- MISI 3.** Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- MISI 4.** Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah;
- MISI 5.** Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran adalah sesuatu yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian 2. Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian 3. Meningkatnya Produksi Peternakan 4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara

3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 memperhatikan pertumbuhan ekonomi sub sektor Pertanian dan Peternakan terhadap sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk mencapai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dapat dicapai dengan sasaran. Meningkatnya Produksi Komoditas, dengan indikator :

- Produksi Komoditas Pertanian (Ton).
- Meningkatnya Produktivitas Komoditas, dengan indikator :
- Meningkatnya Kesejahteraan Petani, dengan indikator : NTP Nilai Tukar Petani (%).

Berdasarkan Penelaahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi tata kerja (SOTK) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka ditentukan *Indikator Kinerja Utama (IKU)* Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 sebagai ukuran tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan

Tabel 2.2. Indikator Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian (Ton/Ha)	Padi	3,96 Ton/Ha	4,36 Ton/Ha	4,16 Ton/Ha	4,20 Ton/Ha
		Jagung	6,08 Ton/Ha	5,10 Ton/Ha	6,38 Ton/Ha	5,99 Ton/Ha
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian (Ton)	- Padi	119.815,20 Ton	101.678,94 Ton	120.924,6 Ton	127.892,18 Ton
		- Jagung	86,89 Ton	8.542,50 Ton	131,463 Ton	6,278 Ton
		- Palawija	540 Ton	540 Ton	715 Ton	21.422,98 Ton
		- Hortikultura	110.119 Ton	78.680,46 Ton	112,908 Ton	115.489,10 Ton
3	Meningkatnya Produksi Peternakan(kg)	Daging	14.603.000 Kg	28.069.290,00 Kg	15.000.000 Kg	34.847.549 Kg
		Telur	1.691.000 Kg	2.451.881,00 Kg	1.741.000 Kg	9.207.079 Kg
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani(Person)	Nilai Tukar Petani (NTP)	100 Persen	100 Persen	107,44 Persen	148,33 Persen

Indikator Tujuan

Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Indikator Sasaran

- Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian
- Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian
- Meningkatnya Produksi Peternakan.
- Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan target kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Indikator dan Target Dinas Pertanian dan Peternakan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	PENJELASAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN			
1	Meningkatkan Produktivitas komoditas Pertanian	1. Padi	4,16 Ton/Ha	Jumlah Produksi Tanaman Pangan PerTahun Produktivitas = Luas Panen	Ton/Ha Ton/Ha	BPS	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
		2. Jagung	6,38 Ton/Ha				
2	Meningkatnya Produksi komoditas Pertanian	1. Padi	120.924,6 Ton	Produksi = Produktivitas x Luas Panen	Ton	BPS	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
		2. Jagung	131.463 Ton				
		3. Palawija (Porang)	715 Ton				
		4. Hortikultura	112.908 Ton				
3	Meningkatnya Produksi Peternakan	1. Daging	15.000.000 Kg	Bobot Karkas (Sapi) = Bobot Hidup x 45% Produksi Daging (Sapi) = Bobot Karkas x 75%	Kg	Bidang Peternakan Kukar	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
		2. Telor	1.741.000 Kg	Total Populasi x 90%Produksi Telor (Ayam Petelur) = 17 Butir Telur	Kg		
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	107,44 Persen	IT = Indeks Harga yang diterima petani IB = Indeks Harga yang dibayar petani IT Nilai Tukar Petani (NTP) = $\frac{IT}{IB} \times 100\%$ IB	Persen	BPS	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan

Sumber: Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan 2025-2029

Tabel 2.4 Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Padi	4,20 Ton/Ha	4,27 Ton/Ha	98,36
		Jagung	5,99 Ton/Ha	4,80 Ton/Ha	124,79
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Padi	127.892,18 Ton	122.034,00 Ton	104,80
		Jagung	6.278 Ton	199.317,00 Ton	3,15
		Palawija	21.422,98 Ton	910,00 Ton	2.354,17
		Hortikultura	115.489,10 Ton	113.960,00 Ton	101,34
3	Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Daging	34.847.549,00 Kg	15.200.00,00 Kg	229,26
		Telur	9.207.079,00 Kg	1.794.000,00 Kg	513,22
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	148,33 Persen	111,09	133,52

Sumber: Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan 2025-2029

Tabel 2.5 Realisasi Kinerja Tahun 2025 sampai dengan 2026

Visi : Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan								
Misi II : Terbaik Dalam Mewujudkan Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sebagai Pondasi Ekonomi Baru Non Ekstraktif								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatkan Daya Saing Sektor Pertanian Daerah	1. Meningkatnya Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Mengembangkan komoditi unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang didukung oleh ketersediaan sumber daya lahan dan sumber daya petani	1. Dukungan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	√	√	√	√	√
			2. Dukungan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya Produksi Sub Sektor Peternakan	1. Mengembangkan komoditi unggulan Peternakan	1. Mengembangkan Populasi Ternak yang sesuai dengan kondisi lahan dan iklim serta Penerapan Teknologi Peternakan	√	√	√	√	√
	3. Meningkatnya Produktivitas Pertanian	1. Meningkatkan Perlindungan Tanaman Pertanian	1. Peningkatan perlindungan tanaman serta penanggulangan bencana dan gangguan usaha Pertanian	√	√	√	√	√
		2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian	2. Pengembangan kemitraan usaha pertanian dan pengolahan hasil pertanian	√	√	√	√	√
		3. Memperkuat penyuluh pertanian dan pendampingan kepada petani	3. Peningkatan penyuluh pertanian dan pengembangan petani milenial	√	√	√	√	√

2.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan target kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
3.27.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan	Nilai	66	75.659.218.544	66	74.975.887.544	- 1.683.331.000	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	13	474.355.900	13	474.355.900	-	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	3	230.178.800	3	230.178.800	-	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun	Laporan	3	72.532.200	3	72.532.200	-	
3.27.01.2.01.08	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	27.490.400	1	27.490.400	-	
3.27.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	13	116.664.100	13	116.664.100	-	
3.27.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	27.490.400	1	27.490.400	-	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Laporan	17	61.458.882.668	17	61.458.882.668	-	

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	Orang/ Bulan	6.685	60.680.312.368	6.685	60.680.312.368	-	
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	578.80.000	12	578.890.000	-	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	23.946.800	1	23.946.800	-	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	3	161.161.500	3	161.161.500	-	
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	1	14.572.000	1	14.572.000	-	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	71.721.175		71.721.175	-	
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	17.385.000	1	17.385.000	-	
3.27.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	28.049.400	1	28.049.400	-	
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	19.269.600	1	19.269.600	-	
3.27.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	7.017.175	1	7.017.175	-	
3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen		-		-	-	
3.27.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		-		-	-	

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
3.27.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		-		-	-	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	1.126.315.500	2	145.315.500	- 981.000.000	
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dokumen	481	981.000.000	-	-	- 981.000.000	
	Pengadaan Pakialan Dinas						981.000.000		Rasionalisasi
3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	29.680.000	2	29.680.000	-	
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	25	107.216.000	25	107.216.000	-	
3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	8.419.500	15	8.419.500	-	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	1.740.318.550	8	1.798.738.550	58.420.000	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	47.076.700	7	47.076.700	-	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	350.000.000	4	350.000.000	-	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	207.030.000	4	236.240.000	29.210.000	Tambahan pagu makan munum rapat
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	28.934.000	2	28.934.000	-	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang Disediakan	Dokumen	682	724.000.000	682	724.000.000	-	

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	Laporan	12	210.450.250	12	239.660.250	29.210.000	Tambahan pagu perijin pimpinan
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK)	Dokumen	650	172.827.600	650	172.827.600	-	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	50	5.114.670.480	50	4.513.179.480	- 601.491.000	
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	2.036.523.000	6	2.036.523.000	-	
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	105	528.237.000	105	113.915.000	- 414.322.000	
	Belanja Handsprayer						22.550.000		Rasionalisasi
	Belanja Cultivator						101.096.000		Rasionalisasi
	Belanja Mesin Pemotong Rumput						111.452.000		Rasionalisasi
	Belanja Pompa Air						123.426.000		Rasionalisasi
	Belanja Kompresor Dan Genset						55.798.000		Rasionalisasi
3.27.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibangun	Unit	3	2.150.000.000	3	1.882.831.000	- 267.169.000	
	Pengawasan Rehab Halaman Gedung Gunung Sentul Mekar Sari						9.600.000		Rasionalisasi
	Rehab Halaman Gedung Gunung Sentul Mekar Sari						199.636.000		Rasionalisasi
	Perencanaan Gudang BBI Rempanga						16.000.000		
	Pengawasan Rehab Penurapan Gedung Sentul Mekar Sari						41.733.000		Rasionalisasi
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Unit	2	399.910.480	2	479.910.480	80.000.000	Tambahan pagu untuk mendukung Pameran/Expo

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
									Era dimana Kutar tuan rumah Expo KTNA
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	4.812.858.871	12	4.812.858.871	-	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.991.000	12	1.991.000	-	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	1.194.540.581	12	1.194.540.581	-	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	132	95.832.000	132	95.832.000	-	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	Laporan	12	3.520.495.290	12	3.520.495.290	-	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	340	1.860.095.400	340	1.700.835.400	- 159.260.000	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	Unit	7	278.212.000	7	151.252.000	- 126.960.000	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan						126.960.000		Rasionalisasi
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Unit	46	698.570.000	46	698.570.000	-	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	78	400.000.000	78	367.700.000	- 32.300.000	
	Belanja Pemeliharaan PC / Laptop						17.700.000		Rasionalisasi
	Belanja Pemeliharaan Printer						14.600.000		Rasionalisasi
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	Unit	37	483.313.400	37	483.313.400	-	

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
3.27.02	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	Ha		89.524.880.230		71.040.739.430	- 18.484.120.800	
		Luas Tanam Jagung	Ha						
		Luas Tanam Palawija	Ha						
		Luas Tanam Hortikultura	Ha						
		Populasi Ternak Besar	Ekor						
		Populasi Ternak Kecil	Ekor						
		Populasi Ternak Unggas	Ekor						
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Unit Sarana Pertanian yang Dimanfaatkan	Unit	10.984	74.573.588.550	10.984	56.730.466.750	- 17.843.121.800	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	172.836.000	2	172.836.000	-	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	Laporan	51	74.400.752.550	51	56.557.630.750	- 17.843.121.800	
	Pengadaan Hand Traktor roda Dua (Glebek) Wilayah 1						996.720.000		Rasionalisasi
	Bibit Tanaman Padi Sawah untuk Penanggulangan Rawan Kemiskinan						11.125.000		Rasionalisasi
	Bibit Tanaman Kangkung Cabut untuk Penanggulangan Rawan Kemiskinan						8.660.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Perangkat Hidroponik Wilayah Tengah						325.176.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Pupuk Pelengkap Cair (PPC)						412.500.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Pompa Air						207.210.000		Rasionalisasi

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
	Pengadaan Combine Harvester untuk Wilayah Hulu						1.650.000.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Traktor Roda 4						1.394.500.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Mesin Pencacah Rumpuk						345.000.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Alat Pendukung Pertanian (Excavator Mini) Wilayah Hulu						1.562.000.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Hand Traktor roda Dua (Rotary) Wilayah 1						1.479.570.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Mulsa Plastik untuk Penanggulangan Inflasi						171.000.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Mesin Power Thresher						500.000.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Pupuk Kandang						350.000.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Pupuk Organik						250.000.000		Rasionalisasi
	Pembangunan Green House Wilayah Hulu						900.000.000		Rasionalisasi
	Pembangunan Green House Wilayah Hilir						1.800.000.000		Rasionalisasi
	Pembangunan Green House Wilayah Tengah						1.350.000.000		Rasionalisasi
	Pengawasan Pembangunan Green House Wilayah Hulu						30.500.000		Rasionalisasi
	Pengawasan Pembangunan Green House Wilayah Hilir						61.000.000		Rasionalisasi
	Pengawasan Pembangunan Green House Wilayah Tengah						45.750.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Terpal Penjemur Gabah						351.650.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Perangkat Hidroponik 1						120.435.550		Rasionalisasi
	Pengadaan Perangkat Hidroponik 2						96.348.450		Rasionalisasi

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
	Pengadaan Herbisida						666.000.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Insectisida untuk Pengendalian Infeksi						12.116.000		Rasionalisasi
	Bibit Tanaman Cabai Rawit untuk Penanggulangan Rawan Kemiskinan						8.030.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Pupuk Non Organik untuk Penanggulangan Infeksi						10.000.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Pupuk Urea untuk Penanggulangan Stunting						178.000.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Benih Padi Sawah Nutrizinc						22.250.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Mesin Pemecah Jagung (Hammer Mili)						218.508.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Pompa Air Irigasi						150.325.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Pupuk Organik Penanggulangan Rawan Kemiskinan						13.500.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Pupuk Organik Kotoran Ternak						247.017.800		Rasionalisasi
	Pengadaan Pupuk untuk Penanggulangan Rawan Kemiskinan						166.875.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Pupuk NPK untuk Penanggulangan Infeksi dan Stunting						274.000.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Alat Kelengkapan Pasca Panen Padi						77.535.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Bibit Tanaman Jambu Air dan Lai						272.000.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Bibit Tanaman Jeruk dan Kelengkeng						395.000.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Bibit Tanaman						63.400.000		Rasionalisasi

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
	Pengadaan Bibit Tanaman Cabai Kenting						92.250.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Cultivator Mini						527.960.000		Rasionalisasi
	Perjalanan Dinas Biasa						29.210.000		Rasionalisasi
3.27.02.2.01	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	Komoditi	31	257.110.280	31	207.036.280	- 50.074.000	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	125.321.160	1	125.321.160	-	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen		-		-	-	
3.27.02.2.02.04	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Dokumen	2	131.789.120	2	81.715.120	- 50.074.000	
	Pengadaan Belanja Saprodi untuk Pengembangan / Pemurnian Varietas Tanaman						50.074.000		Rasionalisasi
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian dan pengawasan	Data Pengawasan	2	122.508.200	2	122.508.200	-	
3.27.02.2.05.02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Dokumen	2	30.894.800	2	30.894.800	-	
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	2	28.766.000	2	28.766.000	-	
3.27.02.2.05.07	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Laporan	50	31.910.000	50	31.910.000	-	
3.27.02.2.05.08	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Laporan	20	30.937.400	20	30.937.400	-	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yan	Tersedianya Benih/Bibit Ternak	Ekor	322	14.571.653.200	322	13.980.728.200	- 590.925.000	

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
	Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Hijauan Pakan ternak	Stek/Polis	2		2			
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak	Ton	2	137.263.200	2	30.258.200	- 107.005.000	
	Pengadaan Bahan Kimia Dan Bibit Rumpun Raja						107.005.000		Rasionalisasi
3.27.02.2.06.03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	8.788	14.434.390.000	8.788	13.950.470.000	- 483.920.000	
	Pengadaan Proyektor						23.118.000		Rasionalisasi
	Pengembangan Budidaya Ternak Ayam Bangkok						460.802.000		Rasionalisasi
3.27.03	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	Meter	12.500	76.298.418.128	12.500	64.770.970.541	- 11.527.447.585	
		2. Jumlah Embung Yang di Bangun	Unit	21		21			
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Dokumen	1	813.384.000	1	289.399.000	- 523.985.000	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	101.730.000	1	101.730.000	-	
3.27.03.2.01.15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	711.654.000	1	187.669.000	- 523.985.000	
	Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Proses Penetapan LP2B/KP2B/LCP2B (3 Kecamatan)						386.210.000		Rasionalisasi

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
	Tenaga Ahli Pemetaan LP2B						137.775.000		Rasionalisasi
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	Unit	97	75.485.034.126	97	64.481.571.541	- 11.003.462.585	
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Embung Petanian	Unit	13	8.012.958.009	13	8.012.958.009	-	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Pembangunan, Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Unit	11	32.308.664.282	11	28.935.595.917	- 3.373.068.365	
	Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani Kegiatan Karya Bakti Kecamatan Marangkayu (Sewa Alat Berat)						432.500.000		Rasionalisasi
	Pekerjaan Pengurugan dengan tanah urug peningkatan Jalan Usaha Tani Kegiatan Karya Bakti Kecamatan Marangkayu (Pengadaan Tanah Urug)						397.200.000		Rasionalisasi
	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kegiatan Karya Bakti Kecamatan Marangkayu (Pengadaan Kayu Ulin)						26.669.690		Rasionalisasi
	Penghamparan Peningkatan Jalan Usaha Tani Kegiatan Karya Bakti Kecamatan Marangkayu (Pengadaan Material Agregat B)						1.837.900.000		Rasionalisasi
	Peningkatan Jalan usaha Tani RMU Kecamatan Marangkayu						500.109.675		Rasionalisasi
	Pengawasan Teknis Konstruksi Peningkatan Jalan usaha Tani RMU Kecamatan Marangkayu						49.539.000		Rasionalisasi
	Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Karya Bakti Kecamatan Marangkayu						129.150.000		Rasionalisasi
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Pembangunan Dam Parit	Unit	8	3.628.166.000	8	958.166.000	- 2.670.000.000	
	Pembangunan Dam Parit Kecamatan Marangkayu						362.000.000		Rasionalisasi

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
	Pembangunan Dam Parit Kecamatan Loa Kulu						392.000.000		Rasionalisasi
	Pembangunan Dam Parit Kecamatan Kota Bangun						392.000.000		Rasionalisasi
	Pengawasan Pembangunan Dam Parit di Kecamatan Kota Bangun						53.000.000		Rasionalisasi
	Pengawasan Pembangunan Dam Parit di Kecamatan Loa Kulu						53.000.000		Rasionalisasi
	Pengawasan Pembangunan Dam Parit di Kecamatan Marangkayu						53.000.000		Rasionalisasi
	Pengawasan Pembangunan Dam Parit di Kecamatan Anggana						53.000.000		Rasionalisasi
	Pembangunan Dam Parit Kecamatan Anggana						392.000.000		Rasionalisasi
	Pembangunan Dam Parit Kecamatan Tenggarong						392.000.000		Rasionalisasi
	Pengawasan Pembangunan Dam Parit di Kecamatan Tenggarong						53.000.000		Rasionalisasi
	Pengawasan Pembangunan Dam Parit di Kecamatan Muara Kaman						53.000.000		Rasionalisasi
	Pembangunan Dam Parit Kecamatan Muara Kaman						392.000.000		Rasionalisasi
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Pintu Air	Unit	19	2.762.001.000	19	1.134.919.600	- 1.627.081.400	
	Pembangunan Pintu Air Pertanian di Kecamatan Sebulu						330.649.500		Rasionalisasi
	Pembangunan Pintu Air Pertanian di Kecamatan Muara Kaman						462.909.300		Rasionalisasi
	Pengawasan Pembangunan Pintu Air Kecamatan Muara Kaman						45.750.000		Rasionalisasi
	Pengawasan Pembangunan Pintu Air Kecamatan Sebulu						35.049.000		Rasionalisasi

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
	Pengawasan Pembangunan Pintu Air Pertanian di Kecamatan Kota Bangun						35.049.000		Rasionalisasi
	Pembangunan Pintu Air Pertanian di Kecamatan Marang Kayu						330.649.500		Rasionalisasi
	Pembangunan Pintu Air Pertanian di Kecamatan Kota Bangun						351.976.100		Rasionalisasi
	Pengawasan Pembangunan Pintu Air Pertanian di Kecamatan Marang Kayu						35.049.000		Rasionalisasi
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Unit	2	386.375.000	2	252.439.000	- 133.936.000	
	Semenisasi Halaman Kantor BPP Tenggarong						117.936.000		Rasionalisasi
	Perencanaan Semenisasi Halaman Kantor BPP Tenggarong						10.000.000		Rasionalisasi
	Pengawasan Semenisasi Halaman Kantor BPP Tenggarong						6.000.000		Rasionalisasi
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan kandang	Unit	16	5.684.104.425	16	2.910.376.805	- 2.773.727.620	
	Pengawasan Pembangunan Kandang Sapi Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang						35.049.000		Rasionalisasi
	Pembangunan Kandang Sapi Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang						368.041.722		Rasionalisasi
	Pembangunan Kandang Sapi dan Kandang Kambing di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang						413.380.195		Rasionalisasi
	Pembangunan Depur Terpadu dan Pembangunan Bio Gas dan Instalasi biogas serta Rumah Tandon						194.688.737		Rasionalisasi

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
	Pengawasan Pembangunan Dapur Terpadu dan Pembangunan Bio Gas Serta Pembuatan Kandang Kambing						50.400.000		Rasionalisasi
	Pengawasan Pembangunan Kandang Kambing dan Ayam, Gudang Pakan						39.600.000		Rasionalisasi
	Pembangunan Kandang Kambing Kelompok Ternak Santri Mandiri Alfarisah Hasyim Desa Rapak Lambur						149.350.264		Rasionalisasi
	Pembuatan Kandang Ayam Kelompok Ternak Ayam Mandiri Sejahtera Desa Bukit Raya Kec. Tgr. Seberang						146.683.295		Rasionalisasi
	Pembuatan Gudang Pakan Dan Bibit Ternak Sapi Kelompok Ternak Jasa Saudara Jaya Desa Bukit Raya Kec. Tgr. Seberang						170.686.016		Rasionalisasi
	Pembuatan Kandang Ayam Kelompok Ternak Ayam Makmur Mandiri Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang						170.686.016		Rasionalisasi
	Pengawasan Pembangunan Kandang Sapi dan Kandang Kambing di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang						35.049.000		Rasionalisasi
	Pembangunan Kandang Kambing Kecamatan Sebulu						197.355.706		Rasionalisasi
	Pembangunan Kandang Sapi Di Kecamatan Loa Kulu						168.019.047		Rasionalisasi
	Pembuatan Kandang Kambing Kelompok Ternak Berkah Nusantara Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman						146.683.295		Rasionalisasi
	Pembuatan Kandang Kambing Kelompok Ternak Ternak Gajah Luhur Desa Bunga Jadi Kec. Muara Kaman						146.683.295		Rasionalisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
	Pembuatan Kandang Kambing Kelompok Ternak Sido Agung Desa Sido Mukti Kec. Muara Kaman						146.683.295	
	Pembangunan Kandang Kambing Kelompok Ternak Ayyas Desa Ma. Kaman Ilir Kecamatan Muara Kaman						194.688.737	
3.27.03.2.02.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi		10	22.528.306.210	10	22.262.556.210	- 265.750
	Pengawasan Lanjutan Irigasi Perpipaan Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong						65.750.000	
	Peningkatan Drainase Kelompok Tani Teluk Wanyi Desa Segihan Kec. Sebulu						200.000.000	
3.27.03.2.02.15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1	174.459.200	1	14.560.000	- 159.899.200
	Pengawasan Rehab Kecil Kantor RPH						8.400.000	
	Perencanaan Rehab Kecil Kantor RPH						14.000.000	
	Rehab Kecil Kantor RPH						137.499.200	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jenis	5	755.793.620	5	755.793.620	
		Persentase Derajat Kesehatan Ternak	Persen	96		96		
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	182.603.420	100	182.603.420	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	2	99.833.720	2	99.833.720	-
3.27.04.2.01.05	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	20	55.035.500	20	55.035.500	-
3.27.04.2.01.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	150	27.734.200	150	27.734.200	-
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan	Jenis	2	106.414.000	2	106.414.000	-
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	2	53.207.000	2	53.207.000	-
3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	3	53.207.000	3	53.207.000	-
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Jenis	2	322.380.000	2	322.380.000	-
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	2	88.294.000	2	88.294.000	-
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	2	234.086.000	2	234.086.000	-
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	Jenis	3	144.396.200	3	144.396.200	-
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	30	41.593.000	30	41.593.000	-

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	2	62.142.000	2	62.142.000	-	
3.27.04.2.04.10	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	7	40.661.200	7	40.661.200	-	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	95	2.470.251.400	95	1.765.527.400	- 704.724.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT Pertanian	Ha	2.400	2.470.251.400	2.400	1.765.527.400	- 704.724.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	2.000	851.771.400	2.000	346.883.400	- 504.888.000	
	Pengadaan Seragam Pengendali PPHHT dan OPT						26.765.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Bahan Perlengkapan Pengendalian OPT						478.123.000		Rasionalisasi
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	313	629.756.600	313	429.920.600	- 199.836.000	
	Pengadaan Seragam Petugas Brigade Pengendalian Banjir dan Kekeringan Lahan Pertanian						16.380.000		Rasionalisasi
	Pengadaan Pompa Air dan Selang						183.456.000		Rasionalisasi
3.27.05.2.01.04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Laporan	90	80.455.000	90	80.455.000	-	
3.27.05.2.01.06	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan	3	908.268.400	3	908.268.400	-	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA, PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	Rekomendasi	35	756.371.000	35	517.627.800	- 238.743.200	

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Surat	20	497.742.000	20	258.998.800	- 238.743.200	
3.27.06.2.01.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	20	497.742.000	20	258.998.800	- 238.743.200	
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sosialisasi Perizinan Usaha Pertanian						238.743.200		Rasionalisasi
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penerbitan Izin Usaha ternak	Dokumen	15	258.629.000	15	258.629.000	-	
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	7	258.629.000	7	258.629.000	-	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Naik Kelas Kelompok Tani	Persen	4	14.595.105.383	4	12.095.498.383	- 2.499.607.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Lembaga Petani yang dibina	Persen	95	14.595.105.383	95	12.095.498.383	- 2.499.607.000	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	19	5.266.769.458	19	4.560.936.458	- 705.833.000	
	Belanja Bahan Kimia Demplot Cabai						333.083.000		Rasionalisasi
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Demplot Cabai						372.750.000		Rasionalisasi
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani yg mendapatkan pelatihan/Pembinaan/ pendampingan/pemumbuhan	Unit	3.049	1.980.357.900	3.049	1.980.357.900	-	

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Kinerja	Satuan	Rasionalisasi APBD 2025		Perubahan Renja 2025		Selisih	Alasan Perubahan/ Keterangan
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	19	3.283.900.200	19	1.704.926.200	- 1.578.974.000	
	Belanja Printer						36.890.000		Rasionalisasi
	Belanja Mesin Pemotong Rumput						111.452.000		Rasionalisasi
	Belanja GPS						264.475.000		Rasionalisasi
	Belanja Mebel						224.415.000		Rasionalisasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor BPP Tabang						428.400.000		Rasionalisasi
	Pengawasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor BPP Tabang						42.471.000		Rasionalisasi
	Pengawasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor BPP Kembang Janggut						42.471.000		Rasionalisasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor BPP Kembang Janggut						428.400.000		Rasionalisasi
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	10	3.349.068.025	10	3.134.268.025	- 214.800.000	
	Belanja Baju Kaos Sekolah Lapang						109.200.000		Rasionalisasi
	Belanja Tas Sekolah Lapang						105.600.000		Rasionalisasi
3.27.07.2.01.08	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	3	303.809.800	3	303.809.800	-	
3.27.07.2.01.09	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Dokumen	1	411.200.000	1	411.200.000	-	
					261.060.018.303		232.434.838.667	- 28.625.179.636	

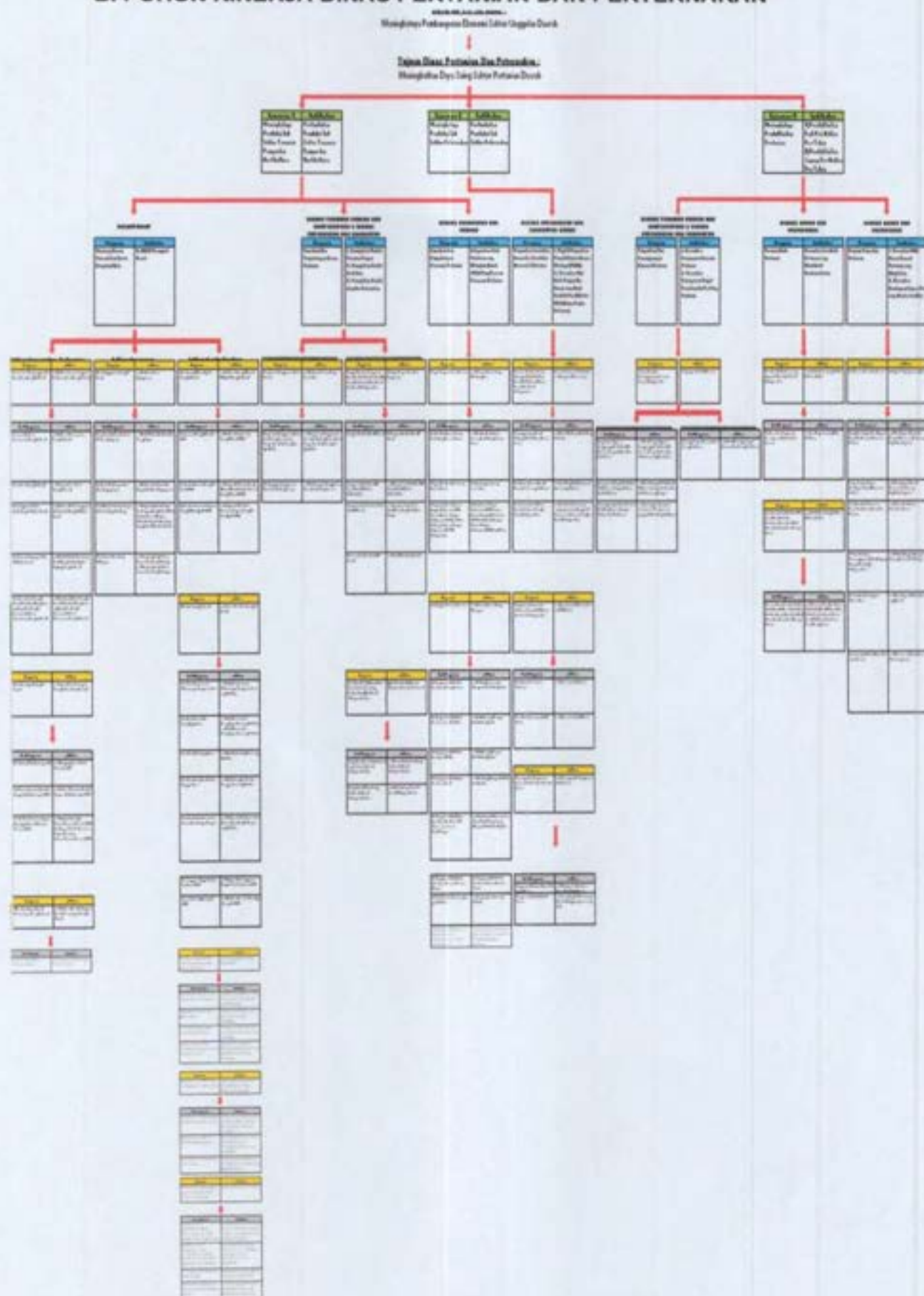
2.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang sudah ditetapkan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan dengan memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun 2025 sebesar Rp. 261.060.018.303,00 dan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp. -28.625.179.636,00 dengan total APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 232.434.838.667,00.

Tabel 2.7 Anggaran APBD Murni dan APBD Perubahan Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025

NO	KETERANGAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TOTAL
1	Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan	261.060.018.303,00	-28.625.179.636,00	232.434.838.667,00

B. POHON KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN



Gambar 2. Pohon Kinerja Dias Pertanian dan Peternakan

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun strategi guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan Visi Bupati Kutai Kartanegara yaitu "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia" dan Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada misi 3 "Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif", Bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, dengan sasaran peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian serta produksi dan populasi ternak dan kesejahteraan petani, maka Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Peningkatan Produksi Daging dan Telur;
3. Meningkatkan Manajemen Usaha Tani; dan
4. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian.

2.4. Rencana Kerja Tahun 2025

Adapun Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025 adalah sebagai Berikut :

1. Tujuan :

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

2. Sasaran :

- a. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian,
- b. Meningkatnya produksi komoditas pertanian
- c. Meningkatnya produksi peternakan
- d. Meningkatnya kesejahteraan petani

Selanjutnya dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perbandingan Data Capaian Pada Tahun 2024 dan Target Indikatif Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Peternakan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Indikatif Tahun 2025	
					Lokasi	Target
Meningkatkan Daya Saing Sektor Pertanian Daerah			1) Pertumbuhan Nilai Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	1,46 Persen	Kutai Kartanegara	1,52 Persen
			2) Pertumbuhan Nilai Produksi Sub Sektor Peternakan	10,23 Persen	Kutai Kartanegara	10,24 Persen
	1) Meningkatnya Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura		Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	1,52 Persen	Kutai Kartanegara	1,63 Persen
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64 Nilai	Kutai Kartanegara	77 Nilai
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kutai Kartanegara	9 Dokumen
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kutai Kartanegara	3 Dokumen
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kutai Kartanegara	3 Laporan
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	Kutai Kartanegara	1 Dokumen
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	Kutai Kartanegara	1 Data

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Indikatif Tahun 2025	
					Lokasi	Target
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kutai Kartanegara	1 Berita Acara
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</i>	13 Laporan	Kutai Kartanegara	14 Laporan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.278 Orang/ Bulan	Kutai Kartanegara	6.734 Orang/ Bulan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kutai Kartanegara	12 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kutai Kartanegara	1 Laporan
		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	1 Dokumen
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Kutai Kartanegara	-
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	Kutai Kartanegara	1 Laporan
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kutai Kartanegara	1 Laporan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Indikatif Tahun 2025	
					Lokasi	Target
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	Kutai Kartanegara	1 Dokumen
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*	Kutai Kartanegara	1 Dokumen
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kutai Kartanegara	2 Dokumen
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	481 Paket	Kutai Kartanegara	635 Paket
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481 Dokumen	Kutai Kartanegara	481 Dokumen
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	Kutai Kartanegara	25 Orang
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kutai Kartanegara	15 Orang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan	Kutai Kartanegara	7 Layanan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kutai Kartanegara	7 Paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kutai Kartanegara	20 Paket

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Indikatif Tahun 2025	
					Lokasi	Target
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kutai Kartanegara	4 Paket
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kutai Kartanegara	3 Paket
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2.000 Dokumen	Kutai Kartanegara	2.486 Dokumen
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248 Laporan	Kutai Kartanegara	12 Laporan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	650 Dokumen	Kutai Kartanegara	650 Dokumen
		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah</i>	<i>7 Unit</i>	<i>Kutai Kartanegara</i>	<i>20 Unit</i>
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Kutai Kartanegara	6 Unit
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kutai Kartanegara	9 Unit
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kutai Kartanegara	3 Unit
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kutai Kartanegara	2 Unit
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>Kutai Kartanegara</i>	<i>12 Bulan</i>

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Indikatif Tahun 2025	
					Lokasi	Target
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kutai Kartanegara	12 Laporan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kutai Kartanegara	12 Laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kutai Kartanegara	12 Laporan
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah</i>	<i>344 Unit</i>	<i>Kutai Kartanegara</i>	<i>341 Unit</i>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kutai Kartanegara	7 Unit
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	219 Unit	Kutai Kartanegara	219 Unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	Kutai Kartanegara	78 Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 Unit	Kutai Kartanegara	37 Unit
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Produksi Tanaman Pangan 2. Produksi Hortikultura 3. Produksi Komoditas Peternakan	1) 131.620 Ton 2) 80.774 Ton 3) 32.642.246 Kg	Kutai Kartanegara	1) 134.092 Ton 2) 112.908 Ton 3) 37.218.688 Kg

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Indikatif Tahun 2025	
					Lokasi	Target
		<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>Jumlah Unit Sarana Pertanian Yang Dimanfaatkan</i>	82 Unit	Kutai Kartanegara	99 Unit
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	Kutai Kartanegara	1 Laporan
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	Kutai Kartanegara	10 Laporan
		<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan Pengendalian dan Pengawasan</i>	<i>2 Data Pengawasan</i>	<i>Kutai Kartanegara</i>	<i>2 Data Pengawasan</i>
		Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	2 Dokumen	Kutai Kartanegara	1 Dokumen
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	Kutai Kartanegara	1 Laporan
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	1 Laporan	Kutai Kartanegara	1 Laporan
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan	Kutai Kartanegara	1 Laporan
		<i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbahnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	<i>1) Tersedianya Benih/Bibit Ternak 2) Tersedianya Hijauan Pakan Ternak</i>	<i>1) 2.773 Ekor 2) 2 Ton</i>	<i>Kutai Kartanegara</i>	<i>1) 2.320 Ekor 2) 1 Ton</i>

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Indikatif Tahun 2025	
					Lokasi	Target
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2 Ton	Kutai Kartanegara	1 Ton
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	2.773 Ekor	Kutai Kartanegara	2.320 Ekor
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Terlayani Prasarana Pertanian	35,29 Persen	Kutai Kartanegara	41,18 Persen
		<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>Kutai Kartanegara</i>	<i>1 Dokumen</i>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	18 Laporan	Kutai Kartanegara	1 Laporan
		Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	0 Ha	Kutai Kartanegara	0 Ha
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	1 Dokumen
		<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun</i>	<i>182 Unit</i>	<i>Kutai Kartanegara</i>	<i>112 Unit</i>
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	23 Unit	Kutai Kartanegara	13 Unit
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	79 Unit	Kutai Kartanegara	28 Unit

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Indikatif Tahun 2025	
					Lokasi	Target
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	Kutai Kartanegara	8 Unit
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	43 Unit	Kutai Kartanegara	21 Unit
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	Kutai Kartanegara	5 Unit
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	20 Unit	Kutai Kartanegara	16 Unit
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	9 Unit	Kutai Kartanegara	20 Unit
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	-	Kutai Kartanegara	1 Unit
	2) Meningkatnya Produksi Sub Sektor Peternakan		Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Peternakan	14,00 Persen	Kutai Kartanegara	14,02 Persen
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	1) 100% 2) 65%	Kutai Kartanegara	1) 100% 2) 70%
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	92 Persen	Kutai Kartanegara	100 Persen

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Indikatif Tahun 2025	
					Lokasi	Target
		<i>Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</i>				
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	Kutai Kartanegara	2 Laporan
		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	20 Wilayah	Kutai Kartanegara	20 Wilayah
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	Kutai Kartanegara	1 Laporan
		<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner</i>	<i>2 Jenis</i>	<i>Kutai Kartanegara</i>	<i>2 Jenis</i>
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2 Laporan	Kutai Kartanegara	1 Laporan
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2 Laporan	Kutai Kartanegara	1 Laporan
		<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	<i>Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet</i>	<i>3 Jenis</i>	<i>Kutai Kartanegara</i>	<i>3 Jenis</i>
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	22 Laporan	Kutai Kartanegara	30 Laporan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Indikatif Tahun 2025	
					Lokasi	Target
		Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	7 Unit Usaha	Kutai Kartanegara	7 Unit Usaha
	3) Meningkatnya Produktivitas Pertanian		1) Produktivitas Padi Per Hektar Per Tahun	4,09 Ton/Ha	Kutai Kartanegara	4,18 Ton/Ha
			2) Produktivitas Jagung Per Hektar Per Tahun	4,30 Ton/Ha	Kutai Kartanegara	4,53 Ton/Ha
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian 2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	1) 82,22% 2) 86,23%	Kutai Kartanegara	1) 80,43% 2) 85,38%
		<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	<i>Luas pengendalian OPT Pertanian</i>	<i>2.400 Ha</i>	<i>Kutai Kartanegara</i>	<i>2.400 Ha</i>
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3.161,55 Ha	Kutai Kartanegara	2.000 Ha
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1.082 Ha	Kutai Kartanegara	2.000 Ha
		Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	5 Laporan	Kutai Kartanegara	5 Laporan
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	6 Laporan	Kutai Kartanegara	6 Laporan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Indikatif Tahun 2025	
					Lokasi	Target
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	131 Unit	Kutai Kartanegara	140 Unit
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	19 Unit	Kutai Kartanegara	19 Unit
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	10 Unit	Kutai Kartanegara	10 Unit
		Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	0	Kutai Kartanegara	3 Unit
		Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	Kutai Kartanegara	1 Dokumen

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 25 bulan Nopember Tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Peterenakan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Produktivitas Padi	Ton/Ha	4,16
		Produktivitas Jagung	Ton/Ha	6,38
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Padi	Ton	120.924,6
		Produksi Jagung	Ton	131.463
		Produksi Palawija (Porang)	Ton	715
		Produksi Hortikultura	Ton	112.908
3	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging	Kg	15.000.000
		Produksi Telur	Kg	1.741.000
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	107,44
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
7	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
8	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
9	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1

10	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
11	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
12	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
13	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77,00
15	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	100
16	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,56 (Inovatif)
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90
18	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau
19	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
20	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1
21	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan:

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian(TON/Ha)	Produktivitas Padi	4,16	Ton/Ha	
		Produktivitas Jagung	6,38	Ton/Ha	
	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian (Ton)	Produksi Padi	120.924,6	Ton	
		Produksi Jagung	131.463	Ton	
		Palawija	715	Ton	
		Hortikultura	112.908	Ton	
	Meningkatnya Produksi Peternakan (Kg)	Daging	15.000.000	Kg	
		Telur	1.741.000	Kg	
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani (Persen)	Nilai Tukar Petani (NTP)	107,44	%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				77.775.887,544
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	Dokumen	Rp. 474.355.900
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	230.178.800
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	72.532.200
3	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	27.490.400
4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	- Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	116.664.100
5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	27.490.400
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	17	Laporan	62.258.882.668
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	412	Orang/bulan	61.480.312.368
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	578.890.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	23.946.800
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan	161.161.500
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	14.572.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1	Dokumen	71,721,175
11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	17,385,000
12	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	28,049,400
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	19,269,600
14	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	7,017,175
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	145,315,500
15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	635	Paket	-
16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481	Dokumen	29,680,000
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	Orang	107,216,000
18	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang	8,419,500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Layanan	1,796,738,550
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	47,076,700
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	350,000,000
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	236,240,000
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	28,934,000
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2486	Dokumen	724,000,000
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	239,660,250
25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	650	Dokumen	172,827,600
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah pengadaan barang milik daerah	50	Unit	6,513,179,480
26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	Unit	2,036,523,000
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	113,915,000
28	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	1,882,831,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	2,479,910,480
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	4,812,858,871
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1,991,000
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1,194,540,581
32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	95,832,000
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3,520,495,290
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Barang Milik Daerah	340	Unit	1,700,835,400
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	151,252,000
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	219	Unit	698,570,000
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78	Unit	367,700,000
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37	Unit	483,313,400
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				72,340,739,430
		- Luas Tanam Padi	41,802	Hektar (Ha)	
		- Luas Tanam Jagung	20,000	Hektar (Ha)	
		- Luas Tanam Palawija (Porang)	55	Hektar (Ha)	
		- Luas Tanam Hortikultura	29,278	Hektar (Ha)	
		- Peningkatan Populasi Ternak Besar	37,061	Ekor	
		- Peningkatan Populasi Ternak Kecil	18,440	Ekor	
		- Peningkatan Populasi Ternak Unggas	17,414,000	Ekor	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	- Jumlah Unit Sarana Pertanian Yang Dimanfaatkan	10984	Unit	58,430,466,750
38	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	- Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	Laporan	172,836,000
39	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	- Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10	Laporan	58,257,630,750

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	31	Komoditi	207,036,280
40	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	- Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen	125,321,160
41	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	- Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	5	Varietas Unggul Baru (VUB)	81.715.120
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Cakupan Pengawasan	2	Jenis	-
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Cakupan Pengendalian dan Pengawasan	2	Data Pengawasan	122,508,200
42	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	- Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	2	Dokumen	30,894,800
43	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	- Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	2	Laporan	28,766,000
44	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	- Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	50	Laporan	31,910,000
45	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	- Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	20	Laporan	30,937,400
46	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	- Tersedianya Benih/Bibit Ternak	322	Ekor	13,580,728,200
47	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	- Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2	Ton	30,258,200
48	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	- Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	8788	Ekor	13,550,470,000
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				67,183,764,490
		- Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	12500	Meter	67,183,764,490
		- Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	21	Unit	12,500
		- Panjang Jaringan Irigasi Yang Dibangun	10000	Meter	21
		- Jumlah DAM Parit Yang Dibangun	4	Unit	10,000
		- Jumlah Pintu Air Yang Dibangun	19	Unit	4
	Pengembangan Prasarana Pertanian	- Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	2	Dokumen	289,399,000
49	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	Laporan	101,730,000
50	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	1	Dokumen	187,669,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
	Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola			
	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	80	Unit	66,894,365,490
51	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	- Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13	Unit	8,012,958,009
52	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	- Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	11	Unit	28,935,595,917
53	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	- Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8	Unit	958,166,000
54	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	- Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	19	Unit	1,134,919,600
55	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	- Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Unit	252,439,000
56	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	- Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	16	Unit	5,323,170,754
57	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	- Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	10	Unit	22,262,556,210
58	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	- Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1	Unit	14,560,000
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	- Persentase Derajat Kesehatan Ternak	96	Persen	755,793,620
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100	Persen	182,603,420
59	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	- Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2	Laporan	99,833,720
60	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	- Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	20	Wilayah	55,035,500
61	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	150	Laporan	27,734,200
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Pengawasan	2	Jenis	106,414,000
62	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	- Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	2	laporan	53,207,000
63	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	- Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	3	Laporan	53,207,000
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	2	Jenis	322,380,000
64	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	- Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2	Laporan	88,294,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
65	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	- Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2	Laporan	234,086,000
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Cakupan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	3	Persen	144,396,200
66	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	- Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	30	Laporan	41,593,000
67	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	Dokumen	62,142,000
68	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	- Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	7	Unit Usaha	40,661,200
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	- Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	95	Persen	1,765,527,400
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	- Luas pengendalian OPT Pertanian	2400	Hektar (Ha)	1,765,527,400
69	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2000	Ha	346,883,400
70	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	313	Ha	429,920,600
71	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	- Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	90	laporan	80,455,000
72	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	- Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3	Laporan	908,268,400
VI	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	- Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang dikeluarkan	35	Rekomenda si	517,627,800
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Fasilitas Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	Surat	
73	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	- Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	20	Laporan	258,998,800
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	- Jumlah Penerbitan Izin Usaha Ternak	15	Dokumen	
74	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	- Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	7	Dokumen	258,629,000
VII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	- Persentase Kenalkan Kelas Kelompok Tani	4	Persen	12,095,498,383
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	- Cakupan lembaga petani yang dibina	95	Persen	12,095,498,383
75	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	- Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19	Unit	4,560,936,458
76	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	- Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3049	Unit	1,980,357,900
77	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	- Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	19	Unit	1,704,926,200

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
78	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	- Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	10	Unit	3,134,268,025
79	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	- Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	3	Unit	303,809,800
80	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	- Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1	Dokumen	411,200,000
TOTAL					232,434,838,687

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Anggaran KAS Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 2025

Akuntabilitas kinerja merujuk pada tanggung jawab untuk secara terbuka memberikan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi kepada pihak yang berwenang menerima laporan kinerja atau yang memberikan mandat. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai pelaksana amanah masyarakat, memenuhi kewajiban akuntabilitas melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut mencerminkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan regulasi tersebut, evaluasi kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Evaluasi kinerja digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan implementasi kegiatan sejalan dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk mencapai misi dan visi lembaga pemerintah. Proses evaluasi kinerja ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan kinerja tersebut, capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dihitung berdasarkan evaluasi atas masing-masing indikator kinerjanya, sedangkan capaian kinerja dari tujuan/ sasaran dihitung berdasarkan evaluasi atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis. Sementara itu, cara untuk menyimpulkan hasil evaluasi kinerja capaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan menghitung rata-rata capaian dari indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Kemudian, berdasarkan evaluasi kinerja, dilakukan analisis pencapaian kinerja dengan tujuan memberikan informasi yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang menyebabkan capaian atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan evaluasi tingkat pencapaian target kegiatan dari berbagai kelompok indikator kinerja kegiatan, serta evaluasi tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang diuraikan dalam dokumen Renstra 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan telah berhasil atau gagal dilaksanakan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Peternakan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Oleh karena itu, pertama kali yang perlu dilakukan oleh setiap instansi pemerintah adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama tersebut akan terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah tersebut. Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam rangka upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pertanian dan Peternakan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Proses reviu tersebut dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Peternakan dapat dilihat pada tabel hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 3.2. Kategori Capaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Tingkat	87	89,17
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100,00
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,3	89,17
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100,00
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3,83
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1,00
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100,00
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100,00
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48,00
10	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7	3,2568
11	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77,00	65,92
12	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	100	100
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,56	58,59
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90	94,46
15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau
16	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	100,00
17	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1	14,3
18	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi	Nilai	3,1	3,04

Sumber : Dinas Pertanian Dan Peternakan Tahun 2025

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

No	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
				2025	2025	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan	Persen	B (77)	B (65,92)	85,61	Tercapai	SAKIP DISTANAK 2025
	1. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	1. Padi	Ton/Ha	4,16	4,20	100,96	Sangat Tinggi	E-Pantau DISTANAK 2025
		2. Jagung	Ton/Ha	6,38	5,99	93,89		
	2. Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	1. Padi	Ton	120.924,6	127.892,18	105,76	Sangat Tinggi	E-Pantau DISTANAK 2025
		2. Jagung	Ton	131.463	6.278	4,78		
		3. Palawija	Ton	715	21.422,98	2.996,22		
		4. Hortikultura	Ton	112.908	115.489,10	102,29		
	3. Meningkatnya Produksi Peternakan	1. Daging	Kg	15.000.000	34.847.549	232,32	Sangat Tinggi	E-Pantau DISTANAK 2025
		2. Telur	Kg	1.741.000	9.207.079	528,84		
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	107,44	148,33	138,06	Sangat Tinggi	E-Pantau DISTANAK 2025

Sumber : Dinas Pertanian Dan Peternakan Tahun 2025

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2024 s.d 2025

No	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1. Pertumbuhan Ekonomi Sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	1,46	1,52	4,66	2,94	188,66	108,09
		2. Pertumbuhan Ekonomi Sub sektor Peternakan	Persen	10,23	10,24	6,46		63,15	
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	1. Padi	Ton/Ha	3,96	4,16	4,36	4,20	114,51	100,96
		2. Jagung	Ton/Ha	6,08	6,38	5,10	5,99	87,61	93,89
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	1. Padi	Ton	119.815,20	120.924,6	101.678,94	127.892,18	96,97	105,76
		2. Jagung	Ton	86.895,00	131.463	8.542,50	6.278	14,15	4.775
		3. Palawija	Ton	540	715	540	21.422,98	-	2996,22
		4. Hortikultura	Ton	110.119,00	112.908	78.680,46	115.489,10	65,09	76,78
3	Meningkatnya Produksi Peternakan	1. Daging	Kg	14.603.000,00	15.000.000	28.069.290,00	34.847.549	142,14	160,36
		2. Telur	Kg	1.691.000,00	1.741.000	2.451.881,00	9.207.079	232,81	508,89
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	104,11	107,44	104,14	148,33	100	138,06

Sumber : Dinas Pertanian Dan Peternakan Tahun 2025

Tabel 3.4. Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Produktivitas Padi	4,20 Ton/Ha	4,27 Ton/Ha	95,67
		Produktivitas Jagung	5,99 Ton/Ha	4,80 Ton/Ha	124,79
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Padi	127.892,18 Ton	122.034,00 Ton	104,80
		Produksi Jagung	6.278,00 Ton	119.317,00 Ton	5,26
		Produksi Palawija (Porang)	21.422,98 Ton	910,00 Ton	2.354,17
		Produksi Hortikultura	115.489,10 Ton	112.908,00 Ton	97,77
3	Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Produksi Daging	34.847.549,00 Kg	15.200.000,00 Kg	229,26
		Produksi Telur	9.207.079,00 Kg	1.794.000,00	136,67
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	148,33 Persen	111,09 Persen	133,52

Sumber : Dinas Pertanian Dan Peternakan Tahun 2025

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi dari Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,00	65,92	85,61			
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Luas Tanam Padi 2. Luas Tanam Jagung 3. Luas Tanam Palawija 4. Luas Tanam Hortikultura 5. Peningkatan Populasi Ternak Besar 6. Peningkatan Populasi Ternak Kecil	41.802,48 20.000,00 55,00 29.278,24 37.061,00 18.440,30	16.418,52 1.179,82 13,55 28.176,70 28.232,00 14.876,00	39,28 5,90 24,64 96,24 76,18 80,67	- Ketersediaan lahan - Ketersediaan Benih Unggul dan Saprasi penunjang - Produk pertanian sebagian besar merupakan kebutuhan utama - Permintaan daging dan minat masyarakat yang tinggi untuk beternak	- Dampak perubahan iklim - Keterbatasan Pupuk Bersubsidi - Berkurangnya jumlah tenaga kerja sektor pertanian - Adanya pembatalan pengembangan jagung oleh investor - Khusus tanaman palawija (Porang) harga jual produksi sejak tahun 2022 mengalami penurunan harga yang cukup signifikan - Tidak semua jenis ternak dapat didatangkan dari luar daerah - Kasus penyakit hewan yang perlu perhatian khusus sehingga perlu adanya seleksi ketat sebagai upaya mencegah penularan penyakit	

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		7. Peningkatan Populasi Ternak Unggas	17.414.000	4.814.042,00	27,64			
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun 2. Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	12.500,00 21,00	22.825,00 13,00	182,60 61,90	1. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 2. Menjadi kebutuhan bagi kelompok tani/Gapoktan untuk mengatasi ketersediaan air dalam budidaya tanaman 3. Tersedianya lahan atau tempat untuk pelaksanaan kegiatan secara swadaya dari kelompok tani/Gapoktan 4. Adanya proposal Kelompok Tani/Gapoktan	1. Tingginya curah hujan pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan sehingga dapat memperlambat proses pekerjaan 2. Akses menuju ke lokasi kurang memadai 3. Sulitnya mendapat lokasi untuk pelaksanaan Kegiatan. 4. legalitas lahan dan sumber daya manusia	
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Derajat Kesehatan Ternak 2. Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	96,00 5,00	96,00 5,00	100 100	- Meningkatnya kasus penyakit hewan tidak menular maupun menular (zoonosis) di beberapa daerah juga berdampak pada daerah Kaltim khususnya Kukar	- Terjadi gangguan alat reproduksi - Terjadi penyakit brucellosis - Terjadi distosia dll	

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan	Solusi yang dilakukan
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian	95,00	95,00	100	- Tersedianya sarana pengendalian OPT	- Dampak perubahan iklim yang berpengaruh pada peningkatan serangan OPT	
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	4,00	2,73	70,75	- Ketersedian pendanaan dan konsep pembinaan	1. Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh dan luasnya wilayah kerja serta jumlah kelompok tani yang banyak dan waktu terbatas 2. Kemampuan pengurus kelompok tani melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala untuk setiap kegiatan	
7	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1. Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang dikeluarkan	35,00	21,00	60,00			

Sumber : Dinas Pertanian Dan Peternakan Tahun 2025

Tabel 3.6. Perbandingan capaian kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program	Indikator	Satuan	Target		Realisasi				Tingkat Efisiensi	Efisien/Tidak Efisien
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Luas Tanam Padi	Hektar (Ha)	40.802,48	72.340.739.430,00	16.418,52	39,28	51.956.800.678,00	71,82	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		2. Luas Tanam Jagung	Hektar (Ha)	20.000,00		1.179,82	5,90				
		3. Luas Tanam Palawija	Hektar (Ha)	55,00		13,55	24,84				
		4. Luas Tanam Hortikultura	Hektar (Ha)	29.278,24		28.176,70	96,24				
		5. Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	37.061,00		28.232,00	76,18				
		6. Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	18.440,30		14.676,00	80,67				
		7. Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	17.414.000,00		4.614.042,00	27,64				
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Meter	12.500,00	67.183.764.490	22.825,00	182,60	52.628.987.756	78,34	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		2. Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Unit	21,00		13,00	61,90				
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Derajat Kesehatan Ternak	Persen	96,00	755.793.620,00	96,00	100,00	726.659.040,00	96,15	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		2. Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jenis	5,00		5,00	100,00				
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	95,00	1.765.527.400,00	95,00	100,00	442.743.000,00	25,08	Dinas Pertanian dan Peternakan	

No	Program	Indikator	Satuan	Target		Realisasi				Tingkat Efisiensi	Efisien/Tidak Efisien
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)		
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	4,00	12.095.498.383,00	2,73	68,25	9.247.651.979,00	76,46	Dinas Pertanian dan Peternakan	
6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1. Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang Dikeluarkan	Persen	35,00	517.627.800,00	21,00	60,00	158.109.640,0	30,55	Dinas Pertanian dan Peternakan	

Sumber : Dinas Pertanian Dan Peternakan Tahun 2025

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tambahan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Produktivitas Padi	Ton/Ha	4,16	4,20	100,96
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Padi	Ton	120.924,6	127.892,18	105,76
3	Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Produksi Telor	Kg	1.741.000	9.207.079	528,84
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	NTP	107,44	148,33	138,06

Sumber : Dinas Pertanian Dan Peternakan Tahun 2025

Tabel 3.8 Analisis Permasalahan Upaya Mengatasi Masalah

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah (Diisi Oleh OPD)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	66,00	66,97	79.595.858.966,00	70.061.970.433,00	Masih rendahnya SDM pengelolaan pertanian dimasa mendatang	1) Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur Peningkatan ketersediaan air meliputi pembuatan embung. 2) Perbaikan jaringan irigasi yang rusak, 3) Pelaksanaan program pompanisasi dan pipanisasi, 4) Peningkatan kapasitas petani dan fasilitas penyediaan sarana produksi yang tepat guna dan tepat waktu untuk mendukung peningkatan penerapan teknologi; 5) Peningkatan kemampuan sumberdaya petani harus terus ditingkatkan melalui pelatihan, kursus-kursus atau sekolah lapang sehingga diharapkan akan meningkatkan produktivitas pertanian secara menyeluruh. 6) Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, program yang akan ditekankan yaitu peningkatan kemampuan petani dan kelembagaannya, serta menata jaringan agribisnis agar tercipta situasi usaha tani yang kondusif dan menguntungkan semua pihak, khususnya Petani.
1		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan	Dokumen	13	13	474.355.900,00	259.492.751,00	Target sudah tercapai, namun antar Bidang belum saling berkoordinasi sehingga terpenuhinya data untuk	Antara Bidang harus saling berkoordinasi sehingga terpenuhinya data untuk Penyusunan Dokumen

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah (Diisi Oleh OPD)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	17	17	62.258.882.668,00	58.440.975.883,00	Target sudah tercapai, namun Proses Pelaksanaan administrasi masih ada kendala dalam penetapan hasil akhir didalam aplikasi	Petugas harus segera melakukan koordinasi jika terdapat kendala dalam penetapan hasil akhir didalam aplikasi
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	71.721.175,00	47.380.000,00	Target sudah tercapai, namun Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Penganggaran Kurang Terhadap Target Output	Harus petugas segera melakukan koordinasi jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan dan penganggaran
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	145.315.500,00	52.329.500,00	Target sudah tercapai, namun Masih rendahnya SDM ASN dan Non ASN berkelanjutan	Perlu diadakannya pelatihan SDM ASN dan Non ASN berkelanjutan
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	1.798.738.550,00	1.602.900.214,00	Target sudah tercapai, namun masih rendahnya tingkat pelayanan	Dalam pelayanan harus ditingkatkan lagi
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Unit	50	50	6.513.179.480,00	4.515.741.687,00	Target sudah tercapai, namun pengawasan terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah harus tetap lebih ketat	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	4.812.858.871,00	3.687.103.561,00	Target sudah tercapai, namun penerima manfaat bertambah/berkurang. Progres pelaksanaan sesuai target rencana	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	340	340	1.700.835.400,00	1.456.046.837,00	Target sudah tercapai, namun perlu diadakannya pencatatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat dikelola dengan baik	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah (Diisi Oleh OPD)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	Hektar (Ha)	41802.48	16.418,52	91.450.170.000,00	51.956.800.678,00	Stok benih yang terbatas	Melakukan perencanaan untuk pengadaan stok saprodi dan benih padi
			Luas Tanam Jagung	Hektar (Ha)	20.000,00	1.179,82			Stok benih yang terbatas	Melakukan perencanaan untuk pengadaan stok saprodi dan benih jagung
			Luas Tanam Palawija (Porang)	Hektar (Ha)	55,00	13,55			Tidak ada yang berminat untuk mengembangkan karena pemasarannya sulit dan harganya tidak sebanding dengan biaya pemeliharaan	Melakukan analisa kembali dan memberikan solusi komoditi yang sesuai dengan daya dukung lahan yang ada di Kutai Kartanegara
			Luas Tanam Hortikultura	Hektar (Ha)	29.278.24	28.232,00			Lahan yang luas dengan Stok benih yang terbatas	Melakukan perencanaan untuk pengadaan stok benih dan saprodi hortikultura
			Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	37.061.00	28.232,00			Terbatasnya daerah sumber bibit ternak karena masih adanya kejadian Penyakit Mulut Dan Kuku di beberapa daerah sumber bibit ternak sapi	Melakukan pencegahan dan pengobatan penyebaran kepada manusia
			Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	18.440.30	14.876,00			Sering terjadinya penyakit hewan	Melakukan pencegahan dan pengobatan pada ternak kecil
			Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	17.414.30	4.814.042,00			Harga pakan yang sangat mahal, Sering terjadinya penyakit hewan	Melakukan pencegahan dan pengobatan pada ternak kecil
10		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Unit Sarana Pertanian Yang Dimanfaatkan	Unit	10.984,00	10.984,00	58.430.466.750,00	41.535.938.736,00	Sering terjadinya penyakit hewan	Melakukan pencegahan dan pengobatan pada ternak kecil
11		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	Komoditi	31	31	207.036.280,00	176.827.135,00	-Karena air sungai Mahakan sungai Mahakam surut, ternak kerbau tidak ada di kalang. Biasanya naik ke kalang jika kondisi air sungai Mahakan pasang, jadi tidak bisa melakukan pengukuran (survei harga)	Memberikan Pemberitahuan agar senantiasa melakukan Pengalangan jika akan melakukan kegiatan, koordinasi dengan tingkat bawah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah (Diisi Oleh OPD)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Terbatasnya sumber bibit ternak kerbau di Indonesia - Provinsi Kalsel yang juga merupakan sumber bibit kerbau masih belum boleh mengeluarkan bibit karena ada terkendala penyakit Sura	Masih berharap dari sumber luar, maka membuat perencanaan untuk bisa mandiri
12		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan	Jenis	5	0	0	0	tidak ada kendala	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
13		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Ton	2	2	122.508.200,00	118.160.800,00	tidak ada	tidak ada
14		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ekor	322,00	322,00	13.580.728.200,00	10.125.874.007,00	Terbatasnya daerah sumber bibit ternak karena masih adanya kejadian Penyakit Mulut Dan Kuku di beberapa daerah sumber bibit ternak sapi	Mengkondisikan bibit berasal dari daerah yang bebas penyakit menular, atau bibit berasal dari kota lain.
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Meter	12500	37652,59	76.787.103.950,00	52.628.967.756,00	Cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan	Upaya Pelaksanakan kegiatan di awal tahun
			Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Unit	21	13			Cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan	Upaya Pelaksanakan kegiatan di awal tahun
			Panjang Jaringan Irigasi Yang Dibangun	Meter	10.000,00	11.276,52			Cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan	Upaya Pelaksanakan kegiatan di awal tahun

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah (Diisi Oleh OPD)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah DAM Parit Yang Dibangun	Unit	4	2			Cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan	Upaya Pelaksanakan kegiatan di awal tahun
			Jumlah Pintu Air Yang Dibangun	Unit	19	27			Cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan	Upaya Pelaksanakan kegiatan di awal tahun
15		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	Unit	80	149	289.399.000,00	50.369.000,00	Cuaca, Ketersediaan Material	Upaya Pelaksanakan kegiatan di awal tahun
16		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Dokumen	1	1	66.894.365.490,00	52.578.618.756,00	Cuaca, Ketersediaan Material	Upaya Pelaksanakan kegiatan di awal tahun
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Derajat Kesehatan Ternak	Persen	96	95	1.075.000.000,00	726.659.040,00	Target tercapai, namun terjadi Gangguan Alat Reproduksi, dan Terjadinya Distoksia dan lain - lain	Melakukan pemilihan bibit yang baik dan unggul agar tidak lagi terjadi gangguan Alat Reproduksi
			Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jenis	5	5			Dampak perubahan yang berpengaruh pada masyarakat agar terhindar dari Gizi Buruk (Stunting) di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur	Tersedianya Sarana (Daging Segar, Susu, Telur, Produk Olahan dan Produk Hewan) Pengendalian Daging dan Produk Olahan sehingga Aman, Sehat, Utuh dan Halal untuk di Konsumsi Masyarakat dan terbebasnya dari Gizi Buruk (Stunting) khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
17		Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	100	182.603.420,00	66.670.564,00	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
18		Pengawasan Pemasukan dan	Jumlah Pengawasan	Jenis	2	2	106.414.000,00	101.014.000,00	Dampak perubahan yang berpengaruh pada masyarakat	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah (Diisi Oleh OPD)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota							agar terhindar dari Gizi Buruk (Stunting) di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur	
19		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	Jenis	2	2	322.380.000,00	119.060.564,00	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
20		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Peternakan	Persen	3	3	144.396.200,00	137.098.500,00	Lokasi ternak yang berjauhan sehingga memakan waktu dan tidak bisa dilakukan dalam satu hari serta ternak yang tidak ter Vaksin karena dilepaskan pada saat pengobatan atau Vaksinasi pada saat itu	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya, melakukan perencanaan ditingkat bawah/teknis untuk membuat jadwal vaksinasi/pengobatan mengumpulkan ternak yang akan divaksin di satu tempat. Melakukan pengamanan terhadap ternak yang akan divaksin/diobati.
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	95	95	3.050.000.000,00	442.743.000,00	Tidak ada hambatan	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
21		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas pengendalian OPT Pertanian	Ha	2.400,00	2.542,05	1.765.527.400,00	442.743.000,00	Tidak ada hambatan	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang dikeluarkan	Rekomendasi	35	13	1.150.000.000,00	158.109.640,00	Kualitas Sumber Daya Manusia yang bertitel Ahli masih kurang dan variabel ukur yang harus di verifikasi secara simultan	Segera melakukan Open Recrutmen yang bertitel Ahli masih kurang dan variabel ukur yang harus di verifikasi secara simultan
22		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan	Fasilitas Usaha Pertanian yang Kegiatan	Surat	20	14	258.998.800,00	41.240.500,00	Kualitas Sumber Daya Manusia yang bertitel Ahli masih kurang	Segera melakukan Open Recrutmen yang bertitel Ahli masih kurang dan variabel ukur

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah (Diisi Oleh OPD)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						dan variabel ukur yang harus di verifikasi secara simultan	yang harus di verifikasi secara simultan
23		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Ternak	Dokumen	15	7	0	0	Belum muncul inisiatif/permintaan pelaku ternak dalam pendampingan sedangkan sangat butuh pendamping baik itu petugas peternakan maupun Dokter Hewan	Membuka Open recruitment/ Petugas pendamping s peternakan maupun Dokter Hewan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Naik Kelas Kelompok Tani	Persen	4,00	2,83	16.699.000.000,00	9.247.651.979,00	Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang bertitel Ahli masih kurang dan variabel ukur yang harus di nilai secara simultan	Memberikan penganggaran monitoring kelapangan untuk verifikasi kelayakan
24		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan lembaga petani yang dibina	Persen	95	85	12.095.498.383,00	9.247.651.979,00	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia berdedikasi masih kurang serta variabel penilaian yang simultan	Melakukan perencanaan pelatihan bagi SDM baik itu PPL/Petugas Pertanian, Petani dan Peternak
25		Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN 100% pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100					
			Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100					

Sumber : Dinas Pertanian Dan Peternakan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALIASASI	PERSENTASE	KETERANGAN
		UTAMA					
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN 100% pertanggal 31 Maret 2024	Persen	100	100	100	
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun	Persen	100	100	100	
6	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Tingkat	87	89,17	102,49	
7	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100	
8	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,3	89,17	101,69	
9	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100	
10	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3	100	-
11	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	52	59	113,46	-

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALIASASI	PERSENTASE	KETERANGAN
		UTAMA					
12	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100	-
13	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100	
14	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100	
15	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7	3,6	97,30	
16	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65,92	85,61	
17	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	100	100	100	
18	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,56	59,81	113,79	
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90	94,46	104,96	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALIASASI	PERSENTASE	KETERANGAN
		UTAMA					
20	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hiaju	100	
20	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	
21	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1	14,3	98,60	
22	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1	3,04	98,06	

Sumber : Dinas Pertanian Dan Peternakan Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 261.060.018.303,00** sedangkan total realisasi anggaran mencapai **Rp. 232.434.838.667,00** dengan demikian dapat dikatakan bahwa serapan pelaksanaan anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025 mencapai 89,04%.

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dengan realisasi fisik sebesar lebih besar dari realisasi keuangan dengan target program 66 dengan realisasi 66
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian berupa 1) luas tanam padi dengan target 40.641,30 hektar realisasi fisik 29.307,80 hektar 2) luas tanaman jagung dengan target 13.000,00 hektar realisasi fisik 1.658,70 hektar 3) luas
3. tanaman tanam palawija hektar 4) luas tanaman hortikultura 27.781,65 hektar realisasi fisik 14.827,22 hektar 5) peningkatan populasi ternak besar dengan target 36,157,00 ekor realisasi fisik 16.198,00 ekor 6) peningkatan populasi ternak kecil 18.441,00 ekor realisasi fisik 121.836,00 ekor 7) peningkatan populasi unggas 16.975.000,00 ekor realisasi fisik 19.370.909,00 ekor
4. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian berupa 1) panjang jalan usaha tani target 20,000 meter realisasi fisik 43.307,00 meter 2) Embung Pertanian

target 23 unit realisasi 22 unit 3) panjang jaringan irigasi target 27.000 meter realisasi 25.738,94 meter 4) jumlah DAM Parit target 6 unit realisasi 6 unit 5) Jumlah pintu air 33 unit realisasi 43 unit.

5. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner berupa;
1) persentase derajat target 95,00 persen realisasi 98,00 persen 2) cakupan pengawasan dengan target 5 jenis realisasi 5 jenis.
6. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian berupa persentase pengendalian dengan target 90,00 persen realisasi 90,85 persen.
7. Program perizinan usaha pertanian berupa cakupan pelaku usaha dengan target 90,00 persen realisasi 80,00 persen
8. Program penyuluhan pertanian berupa persentase kenaikan dengan target 3 persen yang terealisasi 2,40 persen.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.2. Saran Dan Tindak Lanjut

Agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan, yaitu:

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pertanian dan Peternakan, dengan Strategi pengembangan komoditas unggulan Pertanian dan Peternakan kedepannya perlu ditekankan, dikuatkan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi dan teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan yang menguntungkan sampai dengan pemasaran produk hasil Pertanian dan Peternakan.
2. Pemberdayaan pekebun dengan fokus pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok pekebun/tani dalam rangka peningkatan pendapatan pekebun.
3. Melakukan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur negara maupun petani melalui peningkatan kompetensi dan peningkatan kelembagaan guna meningkatkan usaha Pertanian dan Peternakan yang bertumpu dengan kemampuan dan kemandirian.
4. Melaksanakan sistem pengendalian internal dengan pemetaan resiko masing-masing kegiatan di semua bidang lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan tepat sasaran dan berdampak pada pencapaian outcome kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan baik. Demikian Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LkjIP) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dibuat, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta sebagai alat dalam memberikan informasi pelaksanaan kegiatan kedepan.

Tenggarong, 26 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas,



Moh. Rifari, S.Hut
Pembina IV/a

NIP.19720825 199703 1 004

LAMPIRAN



Gambar 3. Pohon Kinerja Dias Pertanian dan Peternakan



Gambar 4. Grafik Realisasi Keuangan, Fisik dan Tahapan Paket Pekerjaan Tahun 2025